

INTEGRASI ALOKASI ANGGARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DESA MARITANGNGAE KAB.PINRANG

*Integration of Budget Allocation and Community Participation as a Driver of
Economic Development in Maritangngae Village, Pinrang Regency*

Devi Sri Wulandari¹, Darmawan²

Email : devisriwulandari@gmail.com¹, darmawan8387@gmail.com²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

Jl. Jendral Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang Kota Parepare Sulawesi
Selatan 91112

Abstract

Rural economic development is a key pillar in improving the welfare and independence of rural communities. Its success is not only determined by the amount of budget allocated by village governments but also by the level of community involvement in every stage of development. This study aims to analyze the integration of budget allocation and community participation as drivers of rural economic development. A quantitative associative approach was applied by distributing questionnaires to 50 respondents consisting of village officials, BUMDes managers, and community leaders in Maritengngae Village, Suppa Subdistrict, Pinrang Regency. The data were analyzed using descriptive statistics, validity and reliability tests, normality and linearity tests, Pearson correlation, and multiple linear regression. The results show that budget allocation and community participation have a positive and significant relationship with rural economic development achievements. Their integration has been proven to enhance the effectiveness of economic programs, strengthen community ownership, and foster the growth of local enterprises. This study recommends strengthening participatory planning mechanisms to align budget use with community needs and aspirations.

Keywords: Budget Allocation, Community Participation, Rural Economy

Abstrak

Pembangunan ekonomi desa merupakan pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perdesaan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah desa, tetapi juga oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi antara alokasi anggaran dan partisipasi masyarakat sebagai penggerak pembangunan ekonomi desa. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 50 responden yang terdiri atas aparat desa, pengelola BUMDes, dan tokoh masyarakat di Desa Maritengngae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, reliabilitas, normalitas, linearitas, korelasi Pearson, dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran dan partisipasi masyarakat memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap capaian pembangunan ekonomi desa. Integrasi keduanya terbukti memperkuat efektivitas pelaksanaan program ekonomi desa, meningkatkan rasa memiliki masyarakat, dan mendorong pertumbuhan unit usaha lokal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme perencanaan partisipatif agar penggunaan anggaran dapat sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

Kata Kunci: Alokasi Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Ekonomi Desa

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi desa merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi pembangunan nasional yang menekankan pertumbuhan inklusif dan berkeadilan. Desa menjadi simpul penting dalam penguatan ekonomi lokal karena berfungsi sebagai pusat produksi, distribusi, sekaligus konsumsi barang dan jasa. Menurut Pratama dan Lestari (2022), pembangunan ekonomi desa mampu meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan, mengurangi ketimpangan wilayah, serta menjadi motor pertumbuhan daerah. Oleh karena itu, upaya mempercepat pembangunan ekonomi desa perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.

Dalam konteks pembangunan lokal, keberhasilan program tidak hanya diukur dari peningkatan infrastruktur fisik, tetapi juga dari berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat. Desa yang berhasil membangun basis ekonominya dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan kemandirian fiskal desa. Menurut Sari dan Hidayat (2020), penguatan ekonomi desa merupakan langkah strategis untuk memutus rantai ketergantungan desa terhadap bantuan eksternal. Pembangunan ekonomi desa juga menjadi indikator utama keberhasilan pemanfaatan Dana Desa yang digulirkan sejak 2015.

Salah satu instrumen utama untuk mendorong pembangunan ekonomi desa adalah alokasi anggaran desa yang bersumber dari Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa. Dana yang dialokasikan ke bidang ekonomi berperan penting dalam membiayai kegiatan penguatan BUMDes, pelatihan usaha mikro, pengembangan pertanian, dan penyediaan infrastruktur ekonomi. Data BPS Kabupaten Pinrang (2023) menunjukkan bahwa porsi belanja bidang ekonomi di desa-desa wilayah Kecamatan Suppa meningkat rata-rata 11% per tahun sejak 2019. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap pengembangan ekonomi desa mulai tumbuh, meskipun efektivitasnya masih perlu dievaluasi.

Namun, besar kecilnya alokasi anggaran tidak secara otomatis menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi desa. Banyak program pembangunan yang tidak memberikan dampak berarti karena minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Karisma, Subroto, dan Hariyati (2021) menemukan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat menyebabkan proyek ekonomi desa sering tidak sesuai kebutuhan dan tidak dimanfaatkan secara berkelanjutan. Artinya, pembangunan ekonomi desa memerlukan integrasi antara kecukupan anggaran dan keterlibatan aktif masyarakat agar program tidak hanya berjalan, tetapi juga memberi hasil nyata.

Secara konseptual, integrasi ini sejalan dengan pendekatan *Community Driven Development (CDD)* yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat sejak awal dalam proses pembangunan. Prasetyo dan Rahmawati (2022) menyatakan bahwa keterlibatan aktif warga desa meningkatkan relevansi program, efisiensi pelaksanaan, dan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Pendekatan ini terbukti mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal karena program yang dilaksanakan sesuai kebutuhan nyata dan potensi setempat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor pengungkit agar anggaran yang tersedia benar-benar memberi dampak.

Landasan hukum pembangunan desa di Indonesia juga menekankan partisipasi dan transparansi pengelolaan anggaran sebagai prinsip utama. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa harus dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa Dana Desa harus digunakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis perlunya integrasi antara alokasi anggaran dan partisipasi masyarakat dalam mendorong pembangunan ekonomi desa (Kementerian Dalam Negeri, 2022).

Secara faktual, pemerintah telah mengucurkan Dana Desa dalam jumlah besar untuk memperkuat perekonomian perdesaan. BAPPEDA Kabupaten Pinrang (2023) mencatat bahwa setiap desa di Kecamatan Suppa menerima rata-rata Rp1,6 miliar per tahun selama periode 2019–2023. Namun, kontribusinya terhadap penurunan angka kemiskinan desa masih terbatas, hanya sekitar 1,3% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran belum diikuti peningkatan signifikan dalam pembangunan ekonomi desa, sehingga perlu dikaji faktor lain yang memengaruhi efektivitas penggunaan anggaran tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Karisma et al. (2021) menyatakan bahwa peningkatan alokasi anggaran bidang ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi desa, tetapi hasilnya kurang optimal bila partisipasi masyarakat rendah. Sebaliknya, Nurhayati dan Pratama (2020) menemukan bahwa partisipasi masyarakat tinggi dapat meningkatkan capaian pembangunan ekonomi meskipun dengan dukungan anggaran terbatas. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut harus dilihat bukan secara terpisah, melainkan secara terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pembangunan desa.

Sayangnya, sebagian besar penelitian masih membahas alokasi anggaran dan partisipasi masyarakat secara terpisah sehingga tidak menggambarkan interaksi keduanya secara menyeluruh. SMERU Research Institute (2024) menyoroti bahwa pendekatan sektoral membuat analisis pembangunan desa menjadi parsial dan tidak mampu menjelaskan variasi hasil antar desa. Padahal, dalam praktiknya, pembangunan ekonomi desa tidak hanya memerlukan sumber daya keuangan yang memadai, tetapi juga keterlibatan sosial yang kuat untuk memastikan keberlanjutan program.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) tentang integrasi antara alokasi anggaran dan partisipasi masyarakat sebagai penggerak pembangunan ekonomi desa. Lestari dan Hanum (2022) menegaskan bahwa perencanaan pembangunan yang tidak partisipatif sering menghasilkan program yang tidak sesuai kebutuhan, sehingga dana yang besar tidak membawa hasil signifikan. Oleh karena itu, kajian yang memadukan aspek keuangan dan partisipasi sosial secara bersamaan menjadi penting untuk memahami faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi desa.

Selain itu, pemerintah saat ini tengah mengubah orientasi Dana Desa agar tidak hanya membiayai kegiatan fisik, tetapi juga diarahkan pada kegiatan produktif yang memperkuat ekonomi masyarakat desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT, 2023) menekankan bahwa efektivitas Dana Desa hanya dapat dicapai jika didukung partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Hal ini memperkuat urgensi perlunya model pembangunan yang menekankan integrasi antara anggaran dan partisipasi masyarakat.

Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur pembangunan desa dengan menghadirkan perspektif integratif antara sumber daya fiskal (alokasi anggaran) dan modal sosial (partisipasi masyarakat). Sebagian besar literatur sebelumnya lebih menyoroti salah satu aspek secara tunggal, sehingga hasilnya belum mampu menjelaskan variasi capaian antar desa (Prasetyo & Rahmawati, 2022). Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menguji keterkaitan keduanya sebagai penggerak pembangunan ekonomi desa.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi antara alokasi anggaran dan partisipasi masyarakat sebagai penggerak ekonomi desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Maritengngae, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, yang merupakan salah satu desa penerima Dana Desa terbesar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan pembangunan desa yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, karena bertujuan untuk menganalisis hubungan antara alokasi anggaran dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan ekonomi desa. Menurut Sugiyono (2021), penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel yang diukur secara statistik. Pendekatan kuantitatif dipilih karena menghasilkan data numerik yang dapat diolah secara objektif untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan umum.

Penelitian dilaksanakan di Desa Maritengngae, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu desa dengan alokasi Dana Desa terbesar di wilayah Kecamatan Suppa, serta memiliki aktivitas ekonomi desa yang cukup dinamis.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan ekonomi desa, meliputi aparat desa, pengelola

BUMDes, ketua RT/RW, dan tokoh masyarakat Desa Maritengngae. Berdasarkan data Pemerintah Desa Maritengngae tahun 2023, jumlah populasi sebanyak 72 orang. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, karena hanya memilih responden yang memenuhi kriteria keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan ekonomi desa. Jumlah sampel yang ditetapkan adalah 50 responden, yang dinilai telah mencukupi untuk mewakili populasi (Sujarweni, 2020). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, diperoleh melalui penyebaran kuesioner berskala Likert (1–5) kepada responden untuk mengukur persepsi mereka terhadap alokasi anggaran, partisipasi masyarakat, dan capaian pembangunan ekonomi desa.
2. Data sekunder, diperoleh dari dokumen APBDes, RKPDes, laporan realisasi Dana Desa, serta data publikasi dari BPS dan BAPPEDA Kabupaten Pinrang (2023).

Penggunaan data primer dan sekunder secara bersamaan bertujuan memperkuat validitas hasil penelitian (Ghozali, 2021). Data yang terkumpul dianalisis secara bertahap sebagai berikut:

1. Uji validitas menggunakan korelasi Pearson untuk memastikan setiap item pernyataan mengukur konstruk yang tepat.
2. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha untuk menilai konsistensi antarbutir pertanyaan.
3. Uji normalitas (Shapiro-Wilk) untuk melihat distribusi data.
4. Uji linearitas untuk memastikan hubungan antarvariabel bersifat linear.
5. Analisis statistik deskriptif untuk melihat kecenderungan jawaban responden tiap variabel.
6. Uji korelasi Pearson untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antarvariabel.
7. Analisis regresi linier berganda untuk melihat pengaruh simultan alokasi anggaran dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan ekonomi desa.

Seluruh analisis dilakukan menggunakan software SPSS versi 25 (Ghozali, 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan **50 responden** yang terdiri atas aparat desa (20%), pengelola BUMDes (18%), ketua RT/RW (26%), dan tokoh masyarakat (36%) di Desa Maritengngae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Mayoritas responden berusia 31–45 tahun (58%), memiliki pendidikan minimal SMA (76%), dan telah terlibat dalam kegiatan pembangunan desa lebih dari lima tahun (64%). Karakteristik ini menunjukkan bahwa responden merupakan pihak yang cukup memahami proses pembangunan ekonomi desa (BPS Kabupaten Pinrang, 2023).

2. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan teknik korelasi Pearson antara skor item dan skor total ($N = 50$). Nilai r hitung berkisar $0,456-0,812 > r$ tabel ($0,279$), sehingga seluruh item pernyataan pada variabel alokasi anggaran, partisipasi masyarakat, dan pembangunan ekonomi desa dinyatakan **valid**. Hasil ini menunjukkan bahwa butir pertanyaan mampu mengukur konstruk yang dimaksud (Ghozali, 2021).

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan Cronbach's Alpha. Hasilnya sebagai berikut:

Tabel 1 uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Alokasi Anggaran	0,823	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0,867	Reliabel
Pembangunan Ekonomi Desa	0,791	Reliabel

Sumber, data diolah 2025

Semua variabel memiliki nilai $> 0,70$, artinya instrumen kuesioner reliabel dan konsisten dalam mengukur data (Sugiyono, 2021).

4. Uji Normalitas

Hasil uji Shapiro-Wilk menunjukkan nilai signifikansi seluruh variabel $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi syarat analisis parametrik (Ghozali, 2021).

5. Uji Linearitas

Hasil uji ANOVA linearitas menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$ untuk hubungan alokasi anggaran terhadap pembangunan ekonomi desa, dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan ekonomi desa. Artinya, hubungan antarvariabel bersifat **linear**, sehingga layak dianalisis lebih lanjut.

6. Analisis Deskriptif Variabel

Rangkuman skor persepsi responden tiap variabel:

Tabel 2 Rangkuman skor persepsi responden

Variabel	Rata-rata Skor	Kategori
Alokasi Anggaran	3,28	Sedang
Partisipasi Masyarakat	4,12	Tinggi
Pembangunan Ekonomi Desa	3,89	Tinggi

Sumber, data diolah 2025

- a. Alokasi anggaran cukup baik, namun masih dianggap belum optimal dalam proporsi bidang ekonomi.
- b. Partisipasi masyarakat tinggi, terutama dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan ekonomi.
- c. Pembangunan ekonomi desa dinilai cukup berhasil, terlihat dari bertambahnya unit usaha lokal dan penguatan BUMDes.

7. Uji Korelasi Pearson

Untuk mengetahui kekuatan hubungan antarvariabel, digunakan korelasi Pearson.

Tabel 3 Uji Korelasi

Variabel	r	Sig.	Interpretasi
Alokasi Anggaran → Pembangunan Ekonomi Desa	0,614	0,000	Kuat, signifikan
Partisipasi Masyarakat → Pembangunan Ekonomi Desa	0,711	0,000	Kuat, signifikan

Sumber : Data diolah 2025

Hasil menunjukkan bahwa semakin tinggi alokasi anggaran dan partisipasi masyarakat, semakin tinggi capaian pembangunan ekonomi desa.

8. Uji Regresi Linier Berganda

Untuk menguji pengaruh simultan kedua variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4 Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien (β)	t-hitung	Sig.
(Konstanta)	15,281	3,402	0,001
Alokasi Anggaran	0,318	2,984	0,005
Partisipasi Masyarakat	0,457	3,842	0,000

Sumber : Data diolah 2025

Artinya, alokasi anggaran dan partisipasi masyarakat secara simultan menjelaskan 61,3% variasi capaian pembangunan ekonomi desa, sedangkan 38,7% dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian.

Pembahasan

1. Alokasi Anggaran sebagai Penggerak Ekonomi Desa Maritangngae

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran berhubungan positif dan signifikan dengan pembangunan ekonomi desa. Semakin besar proporsi dana desa yang diarahkan untuk kegiatan ekonomi seperti penguatan BUMDes, pelatihan usaha mikro, dan pembangunan pasar desa semakin tinggi pula capaian pembangunan ekonomi. Temuan ini mendukung Karisma, Subroto, dan Hariyati (2021) yang menyatakan bahwa alokasi anggaran yang tepat sasaran mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, SMERU Research Institute (2024) mengingatkan bahwa peningkatan dana tidak selalu diikuti peningkatan hasil jika tidak diimbangi dengan perencanaan yang berbasis kebutuhan lokal. Hal ini berarti penting bagi desa untuk memperbaiki kualitas perencanaan program ekonomi agar anggaran benar-benar memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Partisipasi Masyarakat sebagai Faktor Kunci

Partisipasi masyarakat memiliki hubungan lebih kuat ($r = 0,711$) dibandingkan alokasi anggaran ($r = 0,614$), menandakan bahwa keterlibatan warga merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi desa. Masyarakat Desa Maritangngae aktif dalam musyawarah desa, gotong royong kegiatan ekonomi, dan pengawasan program. Hasil ini sejalan dengan Nurhayati dan Pratama (2020) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat tinggi meningkatkan efektivitas program pembangunan, bahkan dengan anggaran terbatas. Prasetyo dan Rahmawati (2022) juga menegaskan bahwa partisipasi memperkuat rasa memiliki terhadap hasil pembangunan sehingga menjamin keberlanjutan program. Artinya, partisipasi tidak hanya pelengkap administratif, tetapi merupakan penggerak utama keberhasilan pembangunan ekonomi Desa.

3. Integrasi Kedua Variabel dalam Mendorong Ekonomi Desa Maritangngae

Regresi linier menunjukkan bahwa integrasi alokasi anggaran dan partisipasi masyarakat menjelaskan 61,3% variasi capaian pembangunan ekonomi desa. Temuan ini menunjukkan bahwa anggaran hanya akan efektif bila didukung partisipasi aktif masyarakat. Desa yang memiliki partisipasi tinggi dapat memanfaatkan anggaran secara lebih tepat sasaran karena program disusun berdasarkan aspirasi dan kebutuhan nyata warga. Temuan ini melengkapi studi Karisma et al. (2021) dan Nurhayati & Pratama (2020) yang sebelumnya menguji kedua variabel secara terpisah. Hasil ini menegaskan pentingnya membangun mekanisme perencanaan partisipatif agar sumber daya keuangan dan sosial dapat berjalan sinergis mendorong pertumbuhan ekonomi desa (SMERU, 2024).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai integrasi alokasi anggaran dan partisipasi masyarakat sebagai penggerak pembangunan ekonomi desa di Desa Maritangngae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Alokasi anggaran memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi desa. Semakin besar porsi anggaran yang diarahkan untuk kegiatan ekonomi seperti penguatan BUMDes, pelatihan usaha mikro, dan pembangunan infrastruktur ekonomi, semakin tinggi capaian pembangunan ekonomi desa.
2. Partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang lebih kuat dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi desa dibandingkan alokasi anggaran. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program mendorong efektivitas pelaksanaan program serta meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.
3. Integrasi alokasi anggaran dan partisipasi masyarakat secara simultan menjelaskan 61,3% variasi capaian pembangunan ekonomi desa. Artinya, anggaran hanya akan efektif jika didukung oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh siklus pembangunan.

4. Pembangunan ekonomi desa tidak hanya ditentukan oleh sumber daya keuangan, tetapi juga oleh kekuatan sosial masyarakat. Sinergi antara keduanya menjadi penggerak utama keberhasilan pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan dan inklusif.

Saran

1. Bagi pemerintah Desa Maritangngae, perlu memperbesar proporsi alokasi anggaran untuk kegiatan produktif yang berorientasi ekonomi serta memastikan penyusunan program berbasis potensi lokal agar anggaran benar-benar berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Bagi Badan Permusyawaratan Desa Maritangngae (BPD) dan lembaga desa lainnya, penting untuk memperkuat mekanisme perencanaan partisipatif agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam dokumen perencanaan (RPJMDes, RKPDes) dan implementasinya sesuai kebutuhan nyata.
3. Bagi masyarakat Desa Maritangngae, diharapkan terus meningkatkan partisipasi dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, agar hasil pembangunan dapat berkelanjutan dan memberi manfaat luas.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti kapasitas aparatur Desa, kualitas tata kelola, atau tingkat pendidikan masyarakat agar model penelitian lebih komprehensif dalam menjelaskan pembangunan ekonomi Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPEDA Kabupaten Pinrang. (2023). *Laporan Realisasi Dana Desa dan RKPDes 2023*. Pinrang: BAPPEDA Kabupaten Pinrang.
- BPS Kabupaten Pinrang. (2023). *Pinrang dalam Angka 2023*. Pinrang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Karisma, A., Subroto, W. T., & Hariyati, H. (2021). Pengaruh pendidikan dan investasi terhadap pengangguran di Jawa. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 21(2), 155–170.
- Kemendagri. (2022). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (versi revisi 2022)*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kemendesa PDTT. (2023). *Panduan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Lestari, E., & Hanum, N. (2022). Efektivitas perencanaan pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*, 6(2), 101–113.
- Nurhayati, D., & Pratama, R. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa: Studi pada desa tertinggal di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(2), 101–115.

- Prasetyo, B., & Rahmawati, E. (2022). Pembangunan ekonomi desa berbasis komunitas: Studi implementasi pendekatan community driven development (CDD). *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, 4(1), 44–57.
- Pratama, R., & Lestari, F. (2022). Pertumbuhan ekonomi dan pengembangan desa dalam konteks pemerataan wilayah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 27–39.
- Sari, L., & Hidayat, A. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 9(3), 33–48.
- SMERU Research Institute. (2024). *Tantangan Tata Kelola Dana Desa di Indonesia*. Jakarta: SMERU Research Institute.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara.